

**PENGAMANAN BRIMOB RESIMEN III PASUKAN PELOPOR
AMANKAN AKSI UNJUK RASA DIGEDUNG DPR/MPR**



Disusun Oleh :

HENDRA DWI SAPUTRA

NIM : 24710588

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

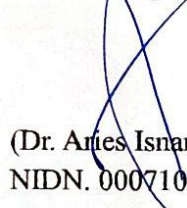
Judul : Pengamanan Brimob Resimen III Pasukan Pelopor
Amankan Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPR MPR
Nama : Hendra Dwi Saputra
NIM : 24710588
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I


(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)
NIDN. 0701118204

Ponorogo, 14 September 2020
Pembimbing II


(Dr. Arif Isnandar, S.H., M.H)
NIDN. 0007106201

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H)
NIDN. 0701049702

PERNYATAAN ORIGINALITAS

NAMA : Hendra Dwi Saputra

NIM : 24710588

FAKULTAS : Hukum

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah saya dengan judul **“Pengamanan Brimob Resimen III Pasukan Pelopor Amankan Aksi Unjuk Rasa Di Gedung DPR MPR”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila ternyata didalam Naskah Karya Ilmiah ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiarisme, saya bersedia ijazah saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ponorogo, 16 September 2026



(Hendra Dwi Saputra)

NIM. 24710588

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan HKI dengan judul “Pengamanan Brimob Resimen III Pasukan Pelopor Amankan Aksi Unjuk Rasa Digatedung Dpr/MPR”, HKI ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak ada yang terlaksana sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya bantuan dari pihak yang telah banyak memberikan bimbingan, serta motivasi kepada penulis, bersama ini saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr Rido Kurnawan Mag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo;
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum, selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo;
3. DR. Yogi Prasetyo, M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan banyak bimbingan, arahan, serta telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan HKI ini;
4. DR. Aries Isnandar, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, kritikan, saran serta kemudahan dalam menyusun HKI;
5. Untuk keluarga besar saya yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, dan motivasi tanpa henti, dan
6. Ratri Dwi Widyaningtyas, S.Kep., Ners yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan selama penyelesaian HKI.

MOTTO

“Jangan malu dengan kegagalanmu, belajarl原因 dan mulai lagi”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia dan yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Penyusunan karya tulis ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh berbagai dukungan dan kemudahan yang tidak terlepas dari rahmat dan pertolongan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki keterbatasan dan belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Penulis juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan karya tulis ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ponorogo, 16 September 2026



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORIGINALITAS	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Metode Penelitian Empiris	2
PEMBAHASAN.....	3
1. Penanganan Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan Oleh Brimob Resimen III Pasukan Pelopor digedung Dpr/Mpr.....	3
2. Kendala Brimob Resimen III Pasukan Pelopor dalam proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Digedung Dpr/Mpr.....	3
PENUTUP	5
A. Kesimpulan.....	5
B. Saran.....	5
DESKRIPSI HKI	6
DAFTAR PUSAKA.....	7
SERTIFIKAT HKI.....	8
LAMPIRAN.....	10

ABSTRAK

HENDRA DWI SAPUTRA. NIM 24710588. PENGAMANAN BRIMOB RESIMEN III PASUKAN PELOPOR AMANKAN AKSI UNJUK RASA DIGEDUNG DPR/MPR. HKI. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2026.

Aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang kerap menimbulkan potensi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi. Brimob Resimen III Pasukan Pelopor sebagai satuan pamungkas Polri memiliki fungsi khusus dalam penanggulangan kerusuhan massa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Brimob Resimen III Pasukan Pelopor di Gedung DPR/MPR serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan wawancara dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brimob Resimen III Pasukan Pelopor menjalankan prosedur pengamanan sesuai dengan fungsi sebagai *striking force* Polri untuk menanggulangi gangguan Kamtibmas.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang perlu diatasi agar pengamanan dapat berjalan lebih optimal, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum serta rasa keadilan masyarakat.

Kata kunci: Brimob, Pasukan Pelopor, Pengamanan, Unjuk Rasa, DPR/MPR